

SKRIPSI

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
PENGUNGKAPAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING*
PERBANKAN SYARIAH
DI INDONESIA**

RAMLAH

10573 05146 14



**Program Studi Akuntansi
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

HALAMAN JUDUL

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
PENGUNGKAPAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING*
PERBANKAN SYARIAH
DI INDONESIA**

OLEH:

RAMLAH

10573 05146 14

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Menyelesaikan Studi
Pada Program Studi Strata 1 Akuntansi**

Program Studi Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2018

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta ayah saya Zakaria dan ibu saya Lija yang senantiasa memberi semangat, dan mendoakan saya hingga detik ini dan telah banyak berkorban dan memotivasi dalam penyelesaian karya ilmiah ini.
2. Saudara saya yang selalu mengingatkan dan mendukung saya baik berupa materi dan sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan kepadaku non materil.
3. Dosen-dosenku, terutama pembimbingku Dr. Muryani Arsal, SE., MM. Ak. CA dan Samsul Rizal, SE., MM yang selalu membimbing, membantu dan tak pernah lelah.
4. Para sahabatku serta teman-teman yang tak dapat saya sebutkan satu-persatu secara rinci yang senantiasa menjadi penyemangatku serta penebar tawa dalam hari-hari yang lalu.

MOTTO HIDUP

“Yang namanya manusia itu punya semangat hidup, kau tidak bisa mengukur seorang sukses dalam sekejap, selama manusia melakukan apa yang dia bisa maka ia punya hak untuk merasa bangga akan hal itu.”

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya.” (Q.S. Al-Baqarah: 286)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : "Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap
Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Perbankan
Syariah Di Indonesia"

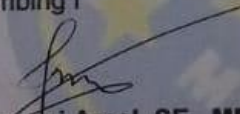
Nama Mahasiswa : Ramlah
No. Stambuk/ NIM : 10573 05146 14
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 31 Agustus 2018

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muryani Aرسال, SE., MM. Ak. CA
NIDN : 0016116503

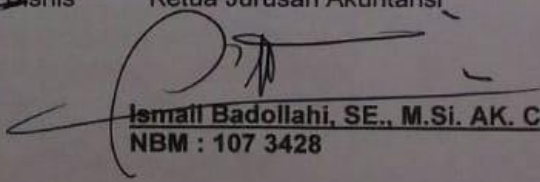

Samsul Rizal, SE., MM
NIDN : 0907028401

Mengetahui,



Ismail Kasong, SE., MM
NBM : 901078

Ketua Jurusan Akuntansi


Ismail Badollahi, SE., M.Si. AK. CA.CSP
NBM : 107 3428



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

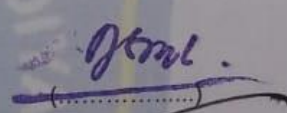
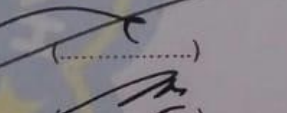
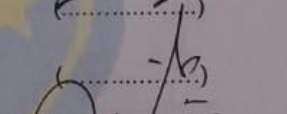
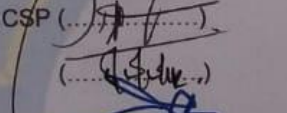
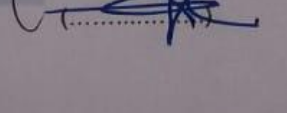

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **RAMLAH**, NIM : **105730514614**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0009/SK-Y/62201/091004/2018M. Tanggal 19 Dzulhijjah 1439H/ 31 Agustus 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 19 Dzulhijjah 1439 H
31 Agustus 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim, HR, SE., MM
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Nurniah, SE., MSA. Ak. CA
2. Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak. CA. CSP (.....) 
3. Mukminati Ridwan, SE., M.Si 
4. Samsul Rizal, SE., MM 



Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903078



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ramlah
Stambuk : 105730514614
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : "Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap
Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Perbankan
Syariah Di Indonesia".

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji pada tanggal 31 Agustus 2018 adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

19 Dzulhijjah 1439 H
Makassar, _____
31 Agustus 2018 M

Yang membuat pernyataan,



Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi,

Ismail Badollahi, SE., M.Si, Ak., CA.CSP
NBM: 107 3428



ABSTRAK

Ramlah, Tahun 2018 **Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Perbankan Syariah Di Indonesia.** Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Muryani Arsal dan Pembimbing II Samsul Rizal.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Perbankan Syariah Di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan asosiatif dan kuantitatif. Data yang diolah adalah data sekunder Ukuran Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah pada tahun 2013 sampai tahun 2017 Bank Syariah Di Indonesia yang didapatkan melalui laporan tahunan (*Annual Report*).

Teknik perhitungan data menggunakan alat bantu statistik dengan aplikasi SPSS. Teknik analisis yang digunakan yaitu uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengumpulan data dapat disimpulkan bahwa peran Ukuran Dewan Komisaris secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Dewan Pengawas Syariah secara parsial berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. secara simultan ukuran dewan komisaris dan dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Kata Kunci : Ukuran Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, *Islamic Social Reporting*, Perbankan Syariah,.

ABSTRACT

*Ramlah, Year 2018 **Influence Corporate Governance Against Disclosure Islamic Social Reporting Syariah Banking In Indonesia**. Thesis Accounting Study Program Faculty of Economics and Business University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Supervisor I Muryani Arsal And Advisor II Samsul Rizal.*

This study aims to see the effect of Influence Corporate Governance on Disclosure Islamic Banking Reporting Islamic Banking In Indonesia. The type of research used in this research is case study research with quantitative associative approach. Processed data are secondary data Size of Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board from 2013 to 2017 Bank Syariah In Indonesia obtained through Annual Report.

Data calculation techniques using statistical tools with SPSS applications. Analysis technique used, classical assumption test, multiple linear regression analysis, and hypothesis test. Based on the calculation and data collection can be concluded that the role of the Board of Commissioners Size is partially no effect and not significant on the disclosure of Islamic Social Reporting. The Sharia Supervisory Board partially influences the disclosure of Islamic Social Reporting. simultaneously the size of the board of commissioners and the supervisory board of sharia affects the disclosure of Islamic Social Reporting.

Keywords: *Islamic Social Reporting, Sharia Banking, Board of Commissioner Size, Sharia Supervisory Board.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-nya. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “ Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Perbankan Syariah Di Indonesia”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Zakaria dan ibu Lija yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Serta seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si., AK., CA., selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Muryani Arsal, SE.,MM.Ak.CA selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Bapak Samsul Rizal, SE. MM, selaku Pembimbing II yang telah berkenang membantu selama dalam penyusunan skripsi.
6. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2014 terkhusus kelas Ak.12-2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
8. Terimah kasih kepada para sahabat atas motivasi bantuan materil dan non materil yang telah berjuang bersama dan menyelesaikan study bersama-sama pula.
9. Terimah kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya Tulis satu persatu yang telah memberikan semangat. Kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada samua pihak terutama

para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum WR, WR.

Makassar, 31 Agustus 2018

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Teori	7
B. Bank syariah	8
1. Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia.....	8

2. CSR Islam Pada Perbankan Syariah.....	10
C. <i>Corporate Governance</i>	11
1. Defenisi <i>Corporate Governance</i>	11
2. Tujuan Penerapan <i>Corporate Governance</i>	19
3. Manfaat Pelaksanaan <i>Corporate Governance</i>	19
4. Prinsip-Prinsip <i>Corporate Governance</i>	20
D. Pengungkapan	22
E. <i>Islamic Social Reporting</i>	25
1. Defenisi <i>Islamic Social Reporting</i>	25
2. Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i>	26
F. Hubungan CG Dengan <i>Islamic Sosial Reporting</i>	28
G. Tinjauan Empiris.....	30
H. Kerangka Konsep.....	36
I. Hipotesis.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
C. Defenisi Operasional Variabel Dan Pengukuran.....	42
1. Variabel Terikat (Variabel dependent)	42
2. Variabel bebas (Variabel independent).....	43
D. Populasi Dan Sampel	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis	46
1. Uji Asumsi Klasik (uji normalitas)	46
2. Uji Analisis Regresi Berganda.....	47

3. Uji Hipotesis	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Hasil Penelitian	51
1. Uji Asumsi Klasik	51
a. Uji Normalitas	51
2. Analisis Regresi Berganda.....	53
3. Uji Hipotesis	55
a. Uji Koefisien determinasi.....	55
b. Uji F (Uji Simultan)	56
c. Uji t (Uji Parsial)	56
B. Pembahasan Hasil Penelitian	58
1. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> Perbankan Syariah di Indonesia	58
2. Pengaruh dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> di Indonesia.....	59
BAB V PENUTUP	61
A. Simpulan	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Daftar Bank Umum Syariah Di Indonesia	10
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1	Jumlah Ukuran Dewan Komisaris.....	44
Tabel 3.2	Jumlah Dewan Pengawas Syariah.....	45
Tabel 3.3	Kriteria Perbankan Syariah Di Indonesia.....	46
Tabel 4.1	Uji Kolmogorov-Smirnov Test.....	52
Tabel 4.2	Hasil Analisis Regresi Berganda	53
Tabel 4.3	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	55
Tabel 4.4	Hasil Uji F Signifikan Simultan.....	56
Tabel 4.5	Hasil Uji t Signifikan Parsial	57

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Konsep.....	36
Gambar 4.1	Uji Normalitas P- Plot	53



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

1. Data Pengungkapan indeks ISR
2. Jumlah Ukuran Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah
3. Hasil Uji Normalitas
4. Hasil Analisis Regresi Berganda
5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
6. Hasil Uji Simultan (Uji F)
7. Hasil Uji Parsial (Uji t)
8. Surat balasan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Rama (2014:85) *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan baik terhadap aspek ekonomi sosial dan lingkungan. Sedangkan menurut Karim dan Kamaruzzaman Bustaman (2017:3) *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan untuk pembangunan ekonomi mapan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungannya.

Corporate Social Responsibility (CSR) tidak hanya terdapat pada ekonomi konvensional, tetapi juga berkembang pada ekonomi syariah. Dimana pelaporan tentang CSR perusahaan yang awal penyalurannya bersifat sukarela menjadi bersifat wajib, yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa laporan tahunan harus memuat beberapa informasi, salah satunya adalah laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan pelaporan sosial syariah atau *Islamic Social Reporting* (ISR) masih dalam bentuk sukarela, sehingga bentuk pelaporan CSR di setiap perusahaan syariah menjadi tidak sama. Pelaporan yang tidak sama tersebut disebabkan tidak adanya standart yang baku secara syariah tentang pelaporan CSR syariah.

Secara konvensional pengungkapan tanggung jawab sosial bagi para pengguna laporan perusahaan termasuk investor adalah suatu hal yang bisa menjadi pertimbangan untuk membuat keputusan berinvestasi karena dari

pengungkapan tersebut para pengguna laporan perusahaan bisa mengetahui tindakan apa saja yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Sehingga investor-investor muslim dan para pengguna laporan perusahaan muslim lainnya, menginginkan pengungkapan social secara syariah. Apabila perusahaan tempat mereka berinvestasi ataupun terkait usaha sesuai dengan syariah, mereka bisa mendapatkan kepuasan spiritual karena sesuai dengan apa yang diyakini sebagai investor muslim.

Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Islam erat kaitannya dengan perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan konsep syariah. Konsep CSR dalam islam lebih ditekankan sebagai bentuk ketaqwaan umat manusia kepada Allah SWT kaitannya dalam perusahaan. Sesuai dengan ketentuan syariah, islam memandang masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan mendapat berkah dari Allah SWT. Dengan kata lain, bisnis dalam islam tidak semata-mata orientasi dunia tetapi harus punya visi akhirat yang jelas.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan CSR dalam konteks islam, maka semakin meningkat juga keinginan untuk menyajikan sebuah pelaporan yang bersifat syariah terutama pelaporan sosial islam (*Islamic Social Reporting*) yang berbasis syariah. Kesesuaian penyajian dan pemenuhan kewajiban terhadap perusahaan dengan konsep syariah dapat dilihat melalui pengungkapan *indeks Islamic Social Reporting*.

Islamic Social Reporting adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. Indeks ISR ini merupakan tolak ukur pelaksanaan tanggung jawab social perbankan syariah yang berisi

kompilasi item-item standar *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting Dan Auditing Organization For Islamic Financial Institutions*) seperti zakat, status kepatuhan syariah, dan yang sudah terbebas dari unsur riba yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item-item CSR yang diungkapkan oleh intitas islam. *islamic social reporting* adalah hal yang penting bagi perbankan syariah untuk memperlihatkan kepada masyarakat mengenai kepatuhan bank dalam menjalankan prinsip syariah.

Pengungkapan *indeks islamic social reporting* terdiri dari beberapa tema yaitu: pendanaan dan investasi, produk, karyawan, masyarakat, dan lingkungan. Pengelolaan bank syariah mengacu kepada *corporate governance* yang dapat mendorong terwujudnya bank syariah yang sehat dan patuh terhadap operasional bank syariah.

Corporate Governance merupakan suatu sistem atau aturan yang mengatur, mengelola, serta mengawasi perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaan untuk memperoleh nilai tambah.

Komponen *corporate governance*, dalam hal ini adalah dewan komisaris dan dewan pengawas syariah merupakan faktor yang dapat mempengaruhi luasnya pengungkapan suatu informasi pada *Islamic Social Reporting* (ISR). Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Khoirudin (2013:228) mengenai faktor yang diduga mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* antara lain adalah beberapa komponen dari *corporate governance*, yaitu ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawasan syariah.

Dewan komisaris dan dewan pengawasan syariah mempunyai fungsi yang penting dalam perbangkan syariah. Dengan wewenang yang dimiliki, maka

dewan komisaris mengawasi dan memberikan petunjuk dan arahan kepada pengelola perusahaan atau pihak manajemen dan bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen serta bertugas mengawasi perusahaan dan menyampaikan semua informasi kepada *stakeholders*, termasuk informasi pengungkapan tanggung jawab sosial. Sedangkan dewan pengawas syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan pengawas syariah merupakan badan independen internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas kepatuhan terhadap aturan dan prinsip-prinsip syariah dalam keseluruhan aspek operasional bank syariah agar operasional perusahaan sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian ini berfokus pada *corporate governance* secara struktural. Komponen *corporate governance* secara struktural dapat diukur yakni, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah yang dapat mempengaruhi pengungkapan ISR. Penelitian tentang Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Islamic Social Reporting* telah dilakukan sebelumnya, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Khoirudin (2013) menunjukkan hasil bahwa ukuran dewan komisaris secara simultan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan variabel ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perbankan syariah di Indonesia. Sampai saat ini, penelitian mengenai pengaruh *Corporate governance* terhadap pengungkapan *islamic social reporting* masih sangat jarang dilakukan di Indonesia (Khoirun, 2013: 229). Selain itu indeks ISR pada perbankan syariah umumnya dilakukan di negara lain, dan jarang sekali dilakukan di Indonesia (Sunarto, 2016:31).

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mencoba menguji pengaruh *Corporate Governance* terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah. Untuk membedakan dengan penelitian yang lain, maka penulis menggunakan dewan komisaris dan dewan pengawas syariah sebagai variable independen. Dimana keduanya termasuk manajemen puncak yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan perbankan syariah. Kemudian digunakan *Islamic Social Reporting* (ISR) untuk mengukur CSR yang diyakini sebagai standar pengungkapan CSR yang sesuai dengan perspektif Islam. Oleh karenanya penulis mencoba mengambil judul **“Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Perbankan Syariah Di Indonesia”** untuk diteliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian, maka rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting* perbankan syariah di Indonesia”?
2. Apakah dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting* perbankan syariah di Indonesia”?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka dalam penelitian ini untuk mengetahui *Corporate Governance* yang terdiri dari dewan komisaris dan dewan pengawas syariah pengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting* perbankan syariah di Indonesia”?

2. Untuk mengetahui apakah dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting* perbankan syariah di Indonesia”?

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman terhadap pelaksanaan pengungkapan *islamic social reporting* pada bank syariah di Indonesia. Secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Dalam bidang akademik, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan ISR pada bank syariah di Indonesia.
2. Bagi pihak perbankan, dapat memberikan sumbangan penelitian tentang pentingnya pertanggung jawaban social perusahaan dan sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perusahaan untuk lebih meningkatkan kepeduliannya pada lingkungan sosial.
3. Bagi peneliti lainnya, hasil dari peneliti ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dan kerangka kerja bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

Menurut Khoiruddin (2013:228) Teori legitimasi adalah salah satu teori yang mendasari pengungkapan CSR. Teori legitimasi dapat digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara struktur *good corporate governance*, dalam hal ini adalah dewan komisaris dan dewan pengawas syariah. Dewan komisaris dan dewan pengawas syariah dapat mendorong manajemen, selaku pelaksana operasi perusahaan untuk mengungkapkan CSR agar BI terpenuhi serta menjalankan fungsi bank syariah yang turut mengupayakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.

Legitimasi dianggap penting bagi perusahaan dikarenakan melegitimasi masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor yang strategi bagi perkembangan perusahaan ke depan. Legitimasi perusahaan dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau yang dicari perusahaan dari masyarakat. Hubungan timbal balik antara masyarakat dan perusahaan dalam konsep legitimasi dapat dilihat apabila masyarakat memperoleh nilai positif, ini berarti perusahaan mendapat legitimasi dikarenakan menjalankan operasi dan kegiatannya berdasarkan norma sehingga perusahaan dapat berkembang ditengah masyarakat dan mudah memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang. Dengan demikian legitimasi memberi manfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Jika suatu perusahaan dipandang tidak mengikuti norma-norma social yang diharapkan dalam operasinya, maka akan ada kesenjangan legitimasi antara operasi perusahaan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu penggunaan teori

legitimasi dalam perbankan syariah dijalankan dengan program yang baik dengan tujuan untuk mendapatkan nilai positif dari masyarakat.

B. Bank Syariah

Menurut Rizal yaya, dkk.(2014:20) Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah, dan bank perkreditan rakyat syariah. Bank secara Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga atau biasa disebut bank tanpa bunga, bank Islam adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw.

1. Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia

Indonesia sebagai sebuah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia mulai mengoperasikan bank syariah pertama kali pada tahun 1992. Pada awal berdirinya perbankan di Negara Indonesia, perbankan masih berpegang pada sistem konvensional atau sistem bunga bank.

Pada tahun 1983 dikeluarkan kebijakan berkaitan dengan pemberian keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk bunga nol persen. Hal ini terus berlangsung hingga dikeluarkan kebijakan Oktober 1988 sebagai kebijakan deregulasi dibidang perbankan yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru (Umam dan Setiawan Budi Utomo, 2017:26-27).

Di Indonesia pada tahun 1992, bank syariah yang pertama didirikan adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Perkembangan sektor perbankan yang terlalu

cepat tidak disertai dengan infrastruktur yang mendukungnya seperti kebijakan yang baik, arah kegiatan usaha, dan ketersediaan sumber daya manusia yang profesional dapat menimbulkan masalah (Purnama, 2016:28).

Di tahun 2008 pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam Pasal 2 Undang-Undang dimaksud disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kemudian pasal 3 disebutkan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Melalui undang-undang ini diharapkan perkembangan perbankan syariah di Indonesia akan berlangsung lebih cepat lebih baik. Perkembangan yang dimaksud meliputi kualitas layanan dan peningkatan ketaatan terhadap prinsip syariah.

Perkembangan bank syariah ini tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Bank syariah di Indonesia perlu meningkatkan kualitas karyawan dan tatakelola perusahaan agar perbankan syariah kedepan dapat tumbuh lebih baik lagi dengan didukung dari sistem yang sesuai ajaran syariat islam dan memiliki karyawan yang disiplin ilmunya sesuai pada tempat mereka bekerja dan mampu mengamalkan sistem ekonomi syariah.

Syariah islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan sesamanya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan kualitas manusia sebagai khalifa-Nya di muka bumi.

Bank umum syariah mengalami perkembangan yang cukup signifikan pasca Pasal 34 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Daftar Bank Umum Syariah Di Indonesia

No	Bank Umum Syariah (BUS)
1.	Bank Muamalat Indonesia
2.	Bank Negara Indonesia Syariah
3.	Bank Rakyat Indonesia Syariah
4.	Bank Central Asia Syariah
5.	Bank Bukopin Syariah
6.	Bank Syariah Mandiri
7.	Bank Victoria Syariah
8.	Bank Jabar Banten Syariah
9.	Bank Panin Syariah
10.	Bank Syariah Mega Indonesia
11.	Bank Maybank Syariah
12.	Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

2. CSR Islam Pada Perbankan Syariah

Corporate Social Responsibility (CSR) berkembang di dunia barat dengan menggunakan sistem konvensional kemudian berkembang pula di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia awalnya berdasarkan sistem konvensional yang kemudian berlanjut berdasarkan syariat islam atau CSR

secara islam. Di Indonesia mayoritas penduduk beragama islam sehingga operasional perbankan syariah dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

Implementasi CSR islam atau bisa dikenal dengan sebutan ISR juga merupakan bagian dari perusahaan dengan menerapkan *Good corporate governance* tidak terkecuali pada perbankan syariah yang menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, dan menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga abid- al-mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah. Pelaksanaan ISR pada perbankan syariah tidak hanya memenuhi kewajiban hukum dan moral, tetapi juga sebagai strategi agar perusahaan tetap bertahan dalam jangka panjang.

C. Corporate Governance

1. Defenisi Corporate Governance

Menurut Junaidi (2015:2) *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dengan menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholder*. Secara teoritis, praktek GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan yaitu kinerja keuangan, meningkatkan kepercayaan investor bahwa praktek GCG mengurangi resiko yang mungkin dilalukan pihak yang berkepentingan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri.

Corporate governance adalah seperangkat aturan yang dijalankan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memastikan bahwa aktivitas dan tujuan perusahaan adalah untuk memenuhi kepentingan-kepentingan dan mensejahterakan para pemangku kepentingan, tidak semata-mata mencapai tujuan perusahaan itu sendiri, penelitian yang dilakukan oleh Chrestyna (2012:8) yang dikutip oleh Riani Rompas dkk (2014:2).

Sementara Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Sehingga secara umum *corporate governance* merupakan suatu sistem atau aturan yang mengatur, mengelola, serta mengawasi perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaan sehingga tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan pertambahan nilai bagi semua pihak pemegang kepentingan.

Pengaruh *corporate governance* dalam suatu perusahaan dimana perusahaan harus mengungkapkan kegiatan yang tidak melanggar hukum, seperti praktek monopoli, manipulasi harga, perjudian, dan penghimpun barang yang dibutuhkan dengan mewujudkan perusahaan yang sehat, serta menegaskan bahwa operasi perusahaan harus dijalankan berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan utama perusahaan adalah untuk keberkahan, kesuksesan di dunia dan di akhirat.

Corporate governance berfokus pada struktur internal yang disebut struktur tatakelola (*corporate governance*) yaitu berkaitan dengan struktur pertanggung jawaban dan pembagian peran dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah. Selain itu diperlukan pembuatan keputusan atau disebut juga dengan proses atau komponen tata kelola perusahaan yang membahas tentang mekanisme kerja dalam suatu perusahaan yang dijalankan oleh dewan pengawas syariah dan dewan komisaris seperti dijelaskan sebagai berikut;

a. Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris merupakan mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawab untuk mengontrol tindakan manajemen puncak. Dewan komisaris memiliki peran penting dalam perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan operasional yang berlangsung di dalam sebuah perusahaan memberikan nasehat kepada direksi dan memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG, serta menyampaikan semua informasi kepada *stakeholder* termasuk informasi pengungkapan tanggung jawab sosial, akan tetapi dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional.

Pengawasan yang dilakukan dewan komisaris diharapkan dapat mengefektifkan salah satu cara untuk mengelola resiko, yaitu dengan melakukan pengelolaan hingga mengungkapkan risiko dalam sebuah laporan keuangan yang diterbitkan setiap tahunnya (Saufanny dan Siti Khomsatun, 2017:50).

Agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut :

- a. Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
- b. Anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.

- c. Fungsi pengawasan dan pemberian nasehat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Kehadiran dewan komisaris untuk meningkatkan ketelitian pengawasan dan pengendalian terhadap manajemen perusahaan sehingga kehadiran dewan komisaris diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi. Jumlah dewan komisaris yang besar menguntungkan perusahaan dari dewannya untuk dapat mengelola sumber daya secara lebih baik. Dewan komisaris harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kerugian dari jumlah dewan yang besar berkaitan dengan dua hal, yaitu meningkatnya permasalahan dalam hal komunikasi dan koordinasi dengan semakin meningkatnya jumlah dewan dan turunnya kemampuan dewan untuk mengendalikan manajemen, sehingga menimbulkan permasalahan agensi yang muncul dari pemisahan antara manajemen dan kontrol.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris. Komposisi dewan komisaris yang diukur dengan rasio terhadap jumlah dewan komisaris mempunyai pengaruh yang signifikan (positif) terhadap pengungkapan sukarela. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin besar anggota dewan komisaris maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan memonitoring, sehingga yang dilakukan akan semakin efektif.

Jumlah dewan komisaris dalam setiap perusahaan KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) dan peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 memberi batas minimal tiga orang dewan komisaris yaitu satu

orang sebagai ketua dewan komisaris sekaligus anggota dan dua orang anggota.

Dewan komisaris dalam satu perusahaan lebih ditekankan pada monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan yang timbul antara dewan direksi dan pemegang saham. Oleh karena itu dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja perusahaan sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Dewan komisaris dalam suatu perusahaan itu penting bagi mendorong manajemen untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perbankan syariah.

b. Dewan Pengawasan Syariah

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009, Dewan pengawas syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Jumlah anggota dewan pengawas syariah menurut ketentuan GCG yang ditetapkan UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yaitu sekurang kurangnya sebanyak dua orang.

Menurut Sunarto (2016:37) dewan pengawas syariah adalah badan independen yang ditempatkan oleh dewan syariah nasional (DSN) pada perbankan dan lembaga keuangan syariah. Mekanisme pengawasan dewan pengawas syariah bertugas untuk mengadakan analisis operasional bank syariah, mengadakan penilaian kegiatan maupun produk dari bank tersebut yang pada akhirnya dewan pengawas syariah dapat memastikan bahwa transaksi, produk dan operasional, bank syariah telah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional.

Upaya untuk memastikan bahwa praktik-praktik dan kegiatan bank-bank syariah tetap berada pada prinsip etika Islam, bank syariah diharapkan untuk membentuk dewan pengawas syariah, yang bertindak sebagai penasihat terhadap bank syariah. Dewan pengawas syariah (DPS) dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan *stakeholder* terhadap kepatuhan syariah. DPS terdiri dari para ahli dalam bidang syariah yang mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi aktivitas perbankan syariah agar patuh pada aturan dan prinsip-prinsip syariah.

Dewan pengawasan syariah mempunyai peranan penting dalam proses pengawasan di bank syariah, memiliki kewenangan untuk memberikan masukan dan memperingatkan pihak manajemen bank syariah tentang pengelolaan dan kebijakan manajemen yang terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dewan pengawas syariah memiliki peran penting bagi perkembangan perbankan syariah, memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa bank tempat ia berinvestasi akan terjaga kehalalannya. Arti penting dewan pengawas syariah bagi bank syariah yaitu: menentukan tingkat kredibilitas bank, unsur utama dalam menciptakan jaminan kepatuhan syariah, dan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan GCG.

Darsono dkk.(2017:290) keharusan DPS dalam perusahaan syariah dan keuangan syariah telah diatur dalam undang-undang no.40 tahun 2007 tentang perseorangan terbatas dan undang-undang no.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kedua undang-undang tersebut menjadi landasan yuridis keberadaan DPS untuk menjamin dijalkannya syariah *compliance* di lembaga perbankan, dan secara luas di lembaga keuangan syariah.

Salah satu pasal pada undang-undang perseroan yang mengkhususkan adanya DPS yaitu:

1. Pasal 109 ayat 1 perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai dewan komisaris wajib mempunyai dewan pengawas syariah,
2. Ayat 3 dewan pengawas syariah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Sedangkan pada undang-undang perbankan 2008 pasal 32 sebagai berikut:

1. Ayat 1 dewan pengawas syariah dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS,
2. Ayat 3 dewan pengawas syariah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Dewan pengawas syariah merupakan komponen yang hanya dimiliki oleh perusahaan yang dijalankan sesuai syariah Islam. Dewan pengawas syariah tidak hanya memberikan saran dan konsultasi dengan manajemen eksekutif mengenai isu-isu syariah, tetapi mengontrol, memastikan dan meyakinkan *stakeholder* bahwa perusahaan telah menjalankan aktivitas operasinya sesuai dengan prinsip syariah.

Tugas dan tanggung jawab DPS diatur dalam peraturan bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 pada pasal 46 dan 47. Pada pasal 46, dewan pengawas syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan

prinsip-prinsip GCG. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah sebagaimana pada Pasal 47 meliputi antara lain :

1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank;
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional – majelis ulama indonesia;
3. Meminta fatwa kepada dewan syariah nasional – majelis ulama Indonesia untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya;
4. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa DPS mempunyai peran dalam pengungkapan ISR perbankan syariah. Hal ini karena DPS mempunyai wewenang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah, antara lain mengawasi kegiatan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah yang bisa diakui sebagai bentuk ISR perusahaan. Selain itu terdapat *danakebajikan (qard)* yang dapat dikategorikan sebagai ISR dan DPS memiliki wewenang untuk mengawasi kegiatan ini.

Keberhasilan DPS dalam menjalankan fungsinya dapat mempengaruhi keyakinan *stakeholder* bahwa bank-bank syariah telah beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa semakin banyak jumlah Dewan Pengawas Syariah maka

akan semakin efektif pengawasan terhadap prinsip syariah dan pengungkapan ISR yang sesuai dengan syariah.

2. Tujuan Penerapan *Corporate Governance*

Tujuan penerapan *good corporate governance* antara lain:

- a. Mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya ekonomis dari sebuah usaha.
- b. Melindungi kepentingan pemegang saham dan memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya,
- c. Meningkatkan investasi nasional.

Memperbesar keuntungan secara nasional dari sebuah usaha yang dikelola secara baik. Pencapaian prestasi yang lebih baik dan penghematan sumber daya dan modal secara ekonomis akan meningkatkan produktivitas dalam negeri ketika bersaing di pasar internasional.

Penerapan *corporate governance* di perbankan syariah melalui bagian-bagian akan membantu bank syariah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, termasuk menjaga kesesuaian kegiatan pihak bank dan prinsip syariah. Oleh karena itu, keberadaan dewan pengawas syariah (DPS) memiliki peran penting dalam entitas islam dengan entitas yang lain (Nugraheni dan Rahma Dewi Yuliani, 2017:135).

3. Manfaat Pelaksanaan *Corporate Governance*.

Pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah menyatakan bahwa *good corporate governance* merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada perbankan syariah.

Pelaksanaan *good corporate governance* diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat berikut ini:

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *corporate value*.
- c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia
- d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen.

4. Prinsip-Prinsip *Corporate Governance*.

Tatakelola (*Corporate Governance*) yang baik pada bank syariah merupakan amanat Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 34 undang-undang menyatakan bahwa bank syariah wajib menerapkan tatakelola yang baik yang mencakup prinsip-prinsip seperti; transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban dan keadilan dalam menjalankan kegiatan usahanya (Darsono, dkk.,2017:304). Sebagai berikut:

a. Transparansi

Transparansi adalah adanya pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi atas hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemegang kepentingan. penyediaan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pertanggung jawaban dan peran manajemen agar pengelolaan perusahaan berjalan efektif. Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola dengan benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

c. Tanggung jawab (*Responsibilitas*)

Pertanggungjawaban yaitu sebuah perusahaan harus memenuhi hukum dan undang-undang yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Termasuk didalamnya pemeliharaan lingkungan hidup, hak-hak konsumen, ketenaga kerjaan dan sebagainya.

d. Keadilan

Keadilan dimaksudkan untuk menjamin hak-hak pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan..

Dari prinsip-prinsip GCG diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaannya akan selalu mengutamakan kepentingan pemegang saham, memberikan informasi, yang terbuka pada semua pihak baik internal maupun eksternal serta mematuhi hukum-hukum yang berlaku di negara tersebut. Prinsip-prinsip GCG ini juga mensyaratkan adanya perlakuan yang sama atas saham-saham yang berada dalam satu tingkatan, melarang prakti-praktik yang mementingkan diri sendiri dan mengharuskan anggota dewan komisaris untuk melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

D. Pengungkapan (*Disclosure*)

Pada umumnya perusahaan pengungkapan merupakan pemberian informasi yang bermanfaat bagi yang membutuhkan. Informasi yang diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai keadaan perusahaan atau aktivitas yang telah dilakukan oleh perusahaan. Bagi pihak di luar manajemen, laporan keuangan merupakan jendela informasi yang memungkinkan mereka melihat kondisi perusahaan tersebut. Informasi ini harus diungkapkan dalam laporan tahunan (*annual report*) perusahaan atau dalam media lainnya, seperti website perusahaan. Luasnya informasi yang dapat diperoleh akan sangat tergantung pada tingkat pengungkapan dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan.

Amurwani (2006) dalam Putri (2014:34) memaparkan bahwa pengungkapan dapat dikaitkan dengan dua aspek, yakni data dan laporan keuangan. Apabila dikaitkan dengan data, pengungkapan mengandung arti bahwa data harus memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, pengungkapan mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Dengan demikian, informasi tersebut harus lengkap, jelas, dan dapat menggambarkan segala aktivitas ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha perusahaan tersebut.

Dalam konteks Islam, tujuan utama dari pelaporan perusahaan adalah untuk memungkinkan perusahaan Islam dalam mewujudkan kepatuhan mereka terhadap syariah. Tujuan lain dari pelaporan perusahaan adalah untuk membantu mengambil keputusan ekonomi. Implikasinya adalah bahwa bisnis syariah harus mengungkapkan semua informasi yang diperlukan untuk

memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan operasional mereka. Dengan kata lain konsep pengungkapan terkait erat dengan konsep akuntabilitas. Tugas untuk mengungkapkan kebenaran adalah masalah yang sangat penting dalam konteks islam, dan kewajiban ini berlaku kepada bisnis begitu pula dengan individu. Dalam konteks islam, mengungkap kebenaran ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat mengetahui pengaruh bisnis terhadap kesejahteraannya.

Menurut Hendriksen dan Breda (1992) dan Evans (2003) dalam Putri (2014:34) terdapat tiga konsep pengungkapan secara umum. Konsep pengungkapan ini terkait dengan pertanyaan berapa banyak informasi yang harus diungkapkan. Adapun konsep-konsep tersebut antara lain :

a) Pengungkapan Cukup (*Adequate Disclosure*)

Pengungkapan cukup adalah pengungkapan minimum yang harus dipenuhi agar laporan keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan pengguna dalam pengambilan keputusan. Pengungkapan jenis ini yang lazim digunakan.

b) Pengungkapan Wajar (*Fair Disclosure*)

Pengungkapan wajar adalah pengungkapan yang harus dicapai agar semua pihak mendapat informasi yang sama.

c) Pengungkapan Penuh (*Full Disclosure*)

Pengungkapan penuh menuntut penyajian dan pengungkapan secara penuh atas seluruh informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan. Pengungkapan ini sering disebut dengan pengungkapan yang berlebihan.

Menurut Darrough (1993) dalam Putri (2014:34) dalam praktiknya, pengungkapan berdasarkan hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar, terdiri dari dua macam yaitu :

a). Pengungkapan Wajib (*mandatory disclosure*)

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan bagian-bagian dalam laporan keuangan yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang berwenang di negara yang bersangkutan, yaitu di Indonesia ialah Bapepam dan Lembaga Keuangan. Jika perusahaan tidak bersedia untuk mengungkapkan informasi secara sukarela maka pengungkapan wajib akan memaksa perusahaan untuk mengungkapkan informasi tersebut.

b). Pengungkapan Sukarela (*voluntary disclosure*)

Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan komponen-komponen yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan berlaku sebagaimana tambahan pengungkapan minimum yang telah ditetapkan. Pengungkapan sukarela mengenai banyaknya informasi yang diungkapkan suatu perusahaan melebihi yang diwajibkan oleh BAPEPAM dan LK. Pengungkapan sukarela merupakan cara untuk mewujudkan transparansi dalam dunia bisnis perusahaan. Hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pengguna lainnya atau kredibilitas perusahaan.

Dari konteks ekonomi, perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi jika informasi tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan. Sedangkan dalam konteks ekonomi islam, perusahaan akan menghasilkan pengungkapan yang benar, adil, dan transparansi apabila memiliki suatu

akuntabilitas terhadap Allah Subhanaahu wa Ta'ala. Konsep dasar akuntabilitas Islam ini percaya bahwa seluruh sumber daya yang telah disediakan dan diciptakan di muka bumi adalah untuk kemaslahatan manusia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang timbul sebagai konsekuensi atas keberadaan perusahaan terkait kegiatan bisnisnya. Sedangkan pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang timbul dari hasil analisis *cost and benefit* perusahaan yang bersangkutan.

E. Islamic Social Reporting

1. Defenisi Islamic Social Reporting (ISR)

Islamic Social Reporting adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. Dimana pelaporan sosial yang tidak hanya berupa keinginan masyarakat terhadap peranan perusahaan dalam ekonomi melainkan berkaitan dengan perspektif spiritual. Prinsip syariah dalam ISR menghasilkan aspek-aspek material, moral, dan spiritual yang menjadi fokus utama dari pelaporan sosial perusahaan. *Islamic Sosial Reporting* lebih menekankan terhadap keadilan sosial dalam pelaporannya selain pelaporan terhadap lingkungan, kepentingan minoritas dan karyawan.

Islamic Social Reporting (ISR) juga bertujuan meningkatkan transparansi dari aktifitas bisnis dengan menyediakan informasi yang relevan dalam memenuhi kebutuhan spiritual dari pengguna laporan perusahaan yang muslim. Selain itu indeks ISR juga menekankan pada keadilan sosial terkait pelaporan mengenai lingkungan, kepentingan minoritas dan karyawan. ISR adalah kumpulan indeks pelaporan tanggung jawab sosial yang sudah ditetapkan oleh

AAOFII yang sesuai dengan syariah dan kemudian dikembangkan oleh masing – masing peneliti selanjutnya.

2. Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Indeks ISR merupakan tolak ukur pelaksanaan tanggung jawab sosial perbankan syariah yang berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas Islam. Dengan demikian *indeks* ISR untuk entitas Islam mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip Islam seperti transaksi yang sudah terbebas dari unsur riba, spekulasi, gharar, serta mengungkapkan zakat, status kepatuhan syariah serta aspek-aspek sosial seperti sodaqoh, waqof, qordul hasan sampai dengan pengungkapan peribadahan dilingkungan perusahaan.

Secara khusus indeks ISR ini adalah perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual (Af'idah,dkk., 2015:225).

Indeks ISR yang dirancang oleh Othman et al. (2009) adalah pengembangan indeks yang diadaptasi dari Haniffa (2002:133). Haniffa mengembangkan laporan islam berdasarkan enam kriteria: Tema Pendanaan dan investasi, produk dan jasa, karyawan, masyarakat, lingkungan hidup, dan tatakelola perusahaan (Merina dan Verawaty, 2016:3). Penelitian ini dilakukan berdasarkan lima tema yaitu: pendanaan dan investasi, produk dan jasa, karyawan, masyarakat, dan lingkungan hidup. Setiap tema pengungkapan

memiliki sub-tema sebagai indikator pengungkapan tema tersebut. Berikut tema pengungkapan dalam *indeks Islamic Social Reporting* :

1. Pendanaan dan Investasi meliputi :
 - a. Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya aturan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Riba dilarang adalah karena Riba adalah transaksi yang tidak adil yang akan mengakibatkan pihak peminjam akan semakin miskin dan pihak yang memberi pinjaman akan semakin kaya (merugikan satu pihak).
 - b. Gharar adalah transaksi yang mengandung ketidakpastian .Ketidakjelasan dapat terjadi dalam lima hal yaitu, dalam kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan dan akad. Transaksi ini dilarang karena satu pihak akan terzalimi walaupun pada awalnya tidak demikian. Informasi pengungkapan lain dalam tema ini adalah mengenai pembayaran zakat.
 - c. Zakat adalah pemberian harta tertentu dalam jumlah tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk penyucian harta dan jiwa.
2. Produk dan Jasa ,Item pengungkapan yang termasuk dalam tema ini adalah pengungkapan atas pertanggungjawaban perusahaan terhadap produk yang diperjualbelikan. Oleh karena itu produk ataupun jasa yang ditawarkan perusahaan harus diungkapkan kehalalannya dan juga keamanan dan kualitas produk ataupun jasa.
3. Karyawan, Pengungkapan yang termasuk dalam tema ini adalah pengungkapan atas perlakuan perusahaan terhadap karyawan. Karyawan harus diperlakukan dan dibayar dengan adil atau tepat dan pemberi kerja harus menjamin pemenuhan kewajiban dasar dan juga spiritual karyawan.

Informasi-informasi yang harus diungkapkan yaitu yang terkait dengan gaji atau upah, jam kerja, hari libur, dll.

4. Masyarakat, Item yang termasuk dalam tema Masyarakat adalah memberikan pengungkapan mengenai tindakan apa saja yang perusahaan berikan untuk masyarakat. Masyarakat memberikan pengungkapan mengenai konsep umma, amanah, dan adil yang menekankan pada pentingnya membagi tujuan umum dan menghilangkan penderitaan dalam masyarakat dan hal tersebut bisa terwujud melalui sadaqah (kegiatan sosial), waqaf (kepercayaan) dan qard hassan (memberikan pinjaan tanpa keuntungan).
5. Lingkungan, Item ini memberikan pengungkapan mengenai tindakan perusahaan terkait dengan lingkungan. Terdapat pemisahan pengungkapan mengenai kegiatan yang dapat membahayakan margasatwa dengan konservasi lingkungan.

F. Hubungan *Corporate Governance* Dengan *Islamic Sosial Reporting* (ISR)

Untuk menilai pengungkapan *Islamic Sosial Reporting* mengacu *Corporate Governance* perusahaan yaitu tatakelola perusahaan dalam sistem ekonomi Islam. Kemunculan tatakelola perusahaan dalam Islam berasal dari konsep khalifah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Makna ayat di atas adalah manusia sebagai utusan Allah SWT telah memberikan kepercayaan oleh Allah untuk menjaga bumi beserta isinya dari segala bentuk kerusakan. Pertanggung jawaban manusia atas amanah tersebut tidak hanya kepada masyarakat atau para pemangku kepentingan, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai pemilik dari bumi beserta isinya. *Islamic Sosial Reporting* dalam Islam tujuan utama adalah akuntabilitas kepada Allah dan masyarakat. Akuntabilitas adalah semata-mata untuk mencapai al-falah dan

kesejahteraan sosial, serta untuk meningkatkan transparansi kegiatan usaha dengan memberikan informasi yang relevan dalam kesesuaian dengan kebutuhan rohani para pembuat keputusan.

Manfaat dari pengungkapan *islamic social reporting* adalah sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat serta meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan menyajikan informasi yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan spritual investor muslim atau kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam hal ini *Islamic Social Reporting* untuk bank syariah, maka semakin meningkat pula keinginan untuk membuat pelaporan sosial islam atau yang sering disebut dengan *islamic social reporting*. Banyak pendapat yang menjelaskan mengenai pengungkapan ISR. *Islamic Social Reporting* merupakan peluasan dari sistem pelaporan keuangan yang merefleksikan perkiraan yang baru dan yang lebih luas dari masyarakat sehubungan dengan peran komunitas bisnis dalam perekonomian.

Salah satu cara untuk menilai pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan secara syariah yaitu dengan menggunakan indeks *Islamic Social Reporting* (ISR). Menurut Haniffa (2002) dalam inuzula(2017:27), *Islamic Social Reporting* adalah perpanjangan pelaporan sosial yang meliputi tidak hanya harapan dewan pengurus atas pandangan masyarakat terhadap peran perusahaan dalam ekonomi, tetapi juga memenuhi perspektif spiritual untuk pengguna laporan yang muslim. *Islamic Social Reporting* bertujuan mendemonstrasikan akuntabilitas kepada Allah SWT dan komunitas. *Islamic Social Reporting* juga bertujuan meningkatkan transparasi dari aktivitas bisnis

dengan menyediakan informasi yang relevan dalam memenuhi kebutuhan spiritual dari pengguna laporan perusahaan yang muslim.

Haniffa (2002) dalam inuzula (2017:27) menemukan bahwa terdapat keterbatasan dalam pelaporan tanggung jawab sosial konvensional sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual yang berdasarkan ketentuan syariah. Kerangka ini dikenal dengan sebutan ISR (*Islamic Social Reporting*). Kerangka konseptual ini tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi pihak muslim melainkan juga untuk membantu perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Allah SWT dan masyarakat. *Islamic Social Reporting* lebih menekankan terhadap keadilan sosial dalam pelaporannya selain pelaporan terhadap lingkungan, kepentingan minoritas dan karyawan.

Dengan demikian disimpulkan bahwa *Islamic social reporting* merupakan kerangka pelaporan tanggungjawab sosial perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. *Islamic social reporting* memiliki dua tujuan utama, yaitu sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat dan untuk meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan cara memberikan informasi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan spritual para pembuat keputusan muslim.

G. Tinjauan Empiris

Untuk itu terdapat penelitian-penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang perbedaan masalah dan hasil penelitian terdapat pada tabel penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Amirul Khoiruddin (2013), mengenai *corporate governance* dan pengungkapan *islamic reporting* pada perbankan syariah di Indonesia. Metode analisis yang digunakan yaitu penelitian deskriptif

kuantitatif. Hasil dari penelitian yang digunakan adalah Menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah secara simultan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *islamic social reporting* perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan variabel ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic sosial reporting* perbankan syariah di indonesia.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Riani Rompas, Ventje liat Dan Agus T. Poputra (2014) penelitian ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *corporate governance* pada laporan tahunan perusahaan yang terdaftar dalam Iq-45 di bursa efek Indonesia. Dimana hasil penelitiannya yaitu: Ukuran perusahaan dan *lverage* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate governance*. Perusahaan sebaiknya meningkatkan komposisi komite audit independen dan tingkat profitabilitas. Karena komite audit independen yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar dapat memantau pengelolaan sebuah perusahaan.
3. Penelitian yang dilakukan Citra Novi Sunarto(2016), tentang *shariah governance* dalam pengungkapan *islamic social reporting index* dan *global reporting index* pada perbankan syariah periode 2010-2013. Hasil penelitian bahwa peran direksi bank syariah berpengaruh terhadap pengungkapan dengan ISRI, sedangkan dewan pengawas syariah berpengaruh dalam pengungkapan dengan menggunakan indeks GRI. Pada hasil *independent samples T-test* ditemukan bahwa pengungkapan dengan ISRI lebih tinggi dibandingkan dengan GRI. Implikasi dari penelitian ini adalah masih lemahnya *shariah governance* pada perbankan syariah di Indonesia selama periode

penelitian 2010-2013, sehingga hal ini dapat menjadi masukan bagi perbankan syariah, Bank Indonesia dan dewan pengawas syariah.

4. Penelitian yang dilakukan Annisa Difa Saufanny dan Siti Khomsatun (2017), mengenai *corporate governance* dan pengungkapan manajemen risiko bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel CG yang berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko perbankan syariah hanya besaran komite audit. Sedangkan jumlah dewan komisaris, ukuran dewan komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran komite audit independen, dan dewan pengawas syariah tidak mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko perbankan syariah. Adanya pengaruh antara ukuran komite audit terhadap pengungkapan risiko perbankan syariah dikarenakan komite audit adalah komite yang dibentuk untuk membantu memaksimalkan fungsi pengawasan perusahaan, pengawasan disini dilakukan dengan membuat serta melaporkan kegiatan operasional bank dalam bentuk laporan keuangan.
5. Penelitian ini dilakukan oleh Peni Nugraheni dan Rahma Dwi Yuliani (2017), tentang mekanisme *corporate governance* dan pengungkapan *islamic social reporting* pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. Sehingga hasil penelitian ini yaitu; (1) jumlah anggota komite remunerasi dan nominasi di Indonesia berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR, (2) jumlah rapat komite remunerasi dan nominasi di Malaysia berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR, (3) rangkap jabatan DPS di Indonesia dan Malaysia, jumlah rapat DPS di Indonesia dan Malaysia, jumlah komite remunerasi dan nominasi di Malaysia, jumlah rapat komite remunerasi dan nominasi di Indonesia, struktur kepemilikan asing di Indonesia dan Malaysia dan struktur

kepemilikan institusional di Indonesia dan Malaysia tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Berdasarkan uraian penelitian–penelitian terdahulu tersebut dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No	Nama penelitian	Judul	Hasil Penelitian
1.	Amirul Khoiruddin (2013)	<i>Corporate Governance</i> Dan Pengungkapan <i>Islamic Reporting</i> Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	Menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah secara simultan berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>islamic social reporting</i> perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan variabel ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>islamic sosial reporting</i> perbankan syariah di indonesia.
2.	Riani Rompas, Ventje Iat Dan Agus T. Poputra (2014)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan <i>Corporate Governance</i> Pada Laporan Tahunan Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Lq-45 Di Bursa Efek Indonesia	Ukuran perusahaan dan <i>lverage</i> berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>corporate governance</i> . Perusahaan sebaiknya meningkatkan komposisi komite audit independen dan tingkat protabilitas. Karena komite audit independen yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar dapat memantau pengelolaan sebuah perusahaan.

3..	Citra Novi Sunarto(2016)	<p><i>Shariah Governance</i></p> <p>Dalam Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting Index</i> Dan <i>Global Reporting Index</i></p> <p>Pada Perbankan Syariah Periode 2010-2013</p>	<p>Menemukan bahwa peran direksi bank syariah berpengaruh terhadap pengungkapan dengan ISRI, sedangkan dewan pengawas syariah berpengaruh dalam pengungkapan dengan menggunakan indeks GRI. Pada hasil <i>independent samples T-test</i> ditemukan bahwa pengungkapan dengan ISRI lebih tinggi dibandingkan dengan GRI. Implikasi dari penelitian ini adalah masih lemahnya <i>shariah governance</i> pada perbankan syariah di Indonesia selama periode penelitian 2010-2013, sehingga hal ini dapat menjadi masukan bagi perbankan syariah, bank Indonesia dan dewan pengawas syariah.</p>
4.	Annisa Difa Saufanny Dan Siti Khomsatun(2017)	<p><i>Corporate Governance</i></p> <p>Dan Pengungkapan Manajemen Risiko Bank Syariah Di Indonesia</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel CG yang berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko perbankan syariah hanya besaran komite audit. Sedangkan jumlah dewan komisaris, ukuran dewan komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran komite audit independen, dan dewan pegawai syariah tidak mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko perbankan syariah. Jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko di perbankan syariah. Adanya pengaruh antara ukuran komite audit terhadap pengungkapan risiko perbankan syariah dikarenakan</p>

			komite audit adalah komite yang dibentuk untuk membantu memaksimalkan fungsi pengawasan perusahaan, pengawasan disini dilakukan dengan membuat serta melaporkan kegiatan operasional bank dalam bentuk laporan keuangan.
5.	Peni Nugraheni dan Rahma Dwi Yuliani (2017)	Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Dan Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) jumlah anggota komite remunerasi dan nominasi di Indonesia berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR, (2) jumlah rapat komite remunerasi dan nominasi di Malaysia berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR, (3) rangkap jabatan DPS di Indonesia dan Malaysia, jumlah rapat DPS di Indonesia dan Malaysia, jumlah komite remunerasi dan nominasi di Malaysia, jumlah rapat komite remunerasi dan nominasi di Indonesia, struktur kepemilikan asing di Indonesia dan Malaysia dan struktur kepemilikan institusional di Indonesia dan Malaysia tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

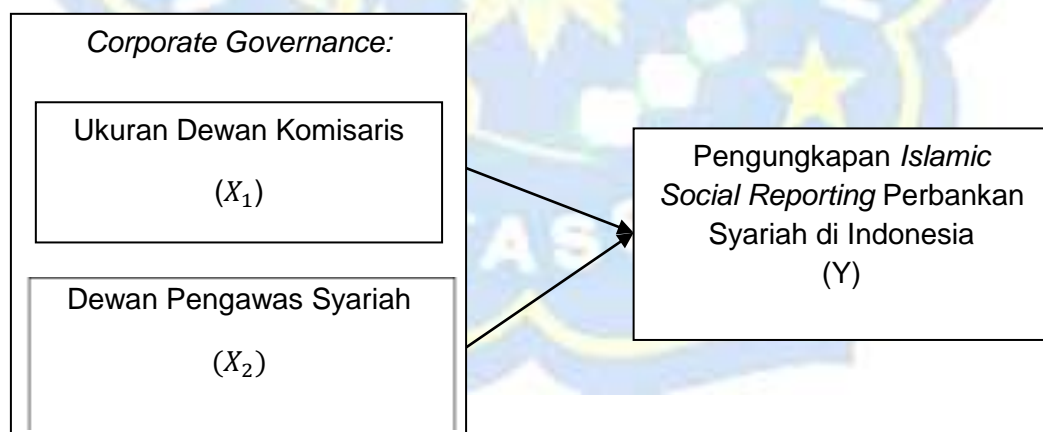
Dari penelitian-penelitian tersebut menjadi referensi penting pada penelitian ini, terutama dalam menjelaskan konsep ISR beserta kriteria-kriteria indeksinya. Namun semua peneliti tersebut hanya mencari dan menghubungkan pengungkapan ISR terutama pada peneliti ini. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan signifikan tersebut adalah Peneliti ini akan mengungkapkan dan menghubungkan tatakelola perusahaan (*corporate*

governance) terhadap pelaporan sosial islam (ISR) berdasarkan indeks ISR dan sampelnya yaitu 3 perbankan syariah di Indonesia.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan keterkaitan antara tatakelola (CG) perusahaan dalam hal ini dewan komisaris dan dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan ISR. Indeks ISR harus beroperasi dengan konsep syariah seperti perbankan syariah yang ada di Indonesia. Sehingga harus dibuktikan dengan hipotesis yang mendukung untuk penelitian ini bahwa perusahaan perbankan syariah akan mengungkapkan indeks ISR dengan baik.

H. Kerangka Konsep

Agar alur penelitian ini jelas, maka digambarkan kerangka pikir penelitian sebagai kerangka yang akan mendukung dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran ini akan menjelaskan bahwa *corporate governance* diduga mempengaruhi pengungkapan *Islamic social reporting*. Model kerangka penelitian pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka konsep

Kerangka konseptual merupakan kesimpulan sementara dari tinjauan teoritis yang mencerminkan adanya hubungan antara variabel yang diteliti.

1. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Ukuran dewan komisaris yaitu jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Jika jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan itu banyak maka pengungkapan informasi akan semakin baik dan resiko perusahaan akan berkurang. Semakin besar ukuran dewan komisaris, maka pengawasan akan semakin baik. Dengan pengawasan yang baik, maka diharapkan pengungkapan *islamic social reporting* akan semakin luas kerna dapat meminimalisir informasi yang memungkinkan dapat disembunyikan oleh manajemen. Hasil penelitian Sembiring (2005) serta veronica dan Sumin (2009) dalam khoiruddin (2013:228) menunjukkan bahwa dewan komisaris mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR.

Jumlah dewan komisaris yang besar akan memunculkan perpaduan kemampuan antara anggotanya sehingga akan meningkatkan ketelitian pengawasan dan pengendalian terhadap manajemen perusahaan. Dengan demikian jumlah dewan komisaris banyak diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi.

H1 :Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting* perbankan syariah di Indonesia.

2. Pengaruh dewan pengawas syariah terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Ukuran dewan pengawas syariah adalah jumlah dari anggota dewan pengawas syariah dalam suatu perusahaan. Jumlah dewan pengawas syariah

yang banyak menunjukkan dampak yang baik bagi pengungkapan sosial perusahaan. Jumlah DPS sangat berdampak pada kemampuan untuk mengontrol dan meninjau semua transaksi bank islam untuk menjamin apakah operasi mereka telah mengikuti secara penuh peraturan dan prinsip-prinsip syariah. Selain itu semakin banyak dewan pengawas syariah, maka kemampuan untuk memantau kegiatan bank nantinya akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat jauh lebih tinggi.

Penelitian Farook dan Lanis (2005) dalam khoirudin (2013:228-229) menemukan bahwa *islamic (corporate governance* di bank islam) terbukti secara signifikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Dalam variabel *Islamic Governance* tersebut dibahas mengenai jumlah dewan pengawas syariah, dimana semakin banyak jumlah DPS dapat meningkatkan level pengungkapan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa DPS mempunyai peran dalam pengungkapan ISR perbankan syariah. Hal ini karena DPS mempunyai wewenang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah, antara lain mengawasi kegiatan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah yang bisa diakui sebagai bentuk ISR perusahaan. Selain itu terdapat dana kebajikan (qard) yang dapat dikategorikan sebagai ISR dan DPS memiliki wewenang untuk mengawasi kegiatan ini.

Keberhasilan DPS dalam menjalankan fungsinya dapat mempengaruhi keyakinan *stakeholder* bahwa bank-bank syariah telah beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa semakin banyak jumlah Dewan Pengawas Syariah maka akan semakin

efektif pengawasan terhadap prinsip syariah dan pengungkapan ISR yang sesuai dengan syariah.

H2 : Dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting* perbankan syariah di Indonesia.

3. Pengaruh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Dewan komisaris dan dewan pengawas syariah mempunyai fungsi yang penting dalam perbankkan syariah. Dewan komisaris dan dewan pengawas syariah memiliki fungsi sebagai pengawasan terhadap manajemen. Dengan wewenang yang dimiliki, maka dewan komisaris dapat menekan manajemen untuk mengungkapkan CSR. Sedangkan DPS mempunyai fungsi untuk mengawasi jalannya operasional perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.

H3 : Ukuran dewan komisaris dan dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting* perbankan syariah di Indonesia.

I. Hipotesis

Hipotesis penelitian ini berdasarkan kerangka pikir dan perumusan masalah adalah;

H1: Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting* perbankan syariah di Indonesia.

H2: Dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting* perbankan syariah di Indonesia.

H3: Ukuran dewan komisaris dan dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting* perbankan syariah di Indonesia.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian asosiatif. Menurut Sugiyono (2014:55) penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Sehingga akan dibangun suatu teori yang dapat berfungsi menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala.

Dalam penelitian ini metode asosiatif digunakan untuk menjelaskan tentang pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan *islamic social reporting* perbankan syariah di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, artinya datanya berkaitan dengan yang dapat dihitung atau berupa angka, yang digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Pada penelitian ini tidak menentukan lokasi karena penelitian ini menggunakan data sekunder, dimana data yang diteliti dari sumber yang sudah ada. Waktu yang digunakan peneliti ini adalah studi *time series*. Dimana studi ini lebih menekankan pada data penelitian berupa data rentetan waktu. Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan *annual report* bank umum syariah di Indonesia yang dapat diakses di *website* (www.idx.co.id).

C. Defenisi Operasional Variabel Dan Pengukuran

Defenisi operasional adalah defenisi variabel yang diukur, yang mengemukakan defenisi variabel-variabel dan indikator yang digunakan pada kerangka pikir dan pembahasan, serta alat analisisnya, berdasarkan penjelasan yang dikemukakan maka beberapa defenisi operasional yang perlu dikemukakan dalam penulisan ini, antara lain:

1. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Islamic Social Reporting (ISR)*. *Islamic Social Reporting* adalah tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial pada laporan tahunan perbangkan syariah yang diukur dengan nilai dari indeks *islamic social reporting* yang bersifat sukarela. *Islamic Social Reporting* merupakan variabel dependen yang diukur dengan indeks ISR dari masing-masing perusahaan setiap tahun. Nilai indeks tersebut diperoleh dengan metode *content analysis* pada laporan tahunan perusahaan.

Komponen utama dari indeks ISR adalah terdiri dari lima tema. Seperti yang dikemukakan Merina dan Verawaty (2016) Metode *skoring* berdasarkan *islamic social reporting* indeks yang terdiri dari 5 tema yaitu ; investasi, produk, karyawan, social (masyarakat), dan lingkungan. Tema tersebut dikembangkan menjadi 35 item pernyataan yaitu:

- a. Investasi terdiri dari: Aktifitas riba, Gaharar, Zakat, Kebijakan dalam mengatasi ketarlambatan pembayaran oleh insolvent clients, current value balance sgeet, dan value added statements
- b. Produk terdiri dari: Status halal atau syariah dalam produk, pengembangan produk, peningkatan pelayanan, dan keluhan pelanggan.

- c. Karyawan terdiri dari: karakteristik pekerjaan, pendidikan dan pelatihan, kesempatan yang sama, kesehatan dan keselamatan kerja, lingkungan kerja, dan perekrutan khusus.
- d. Masyarakat terdiri dari: Shodoqah, wakaf, qard hasan, zakat atau sumbangan dari karyawan atau nasabah, pendidikan, bantuan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, kepedulian terhadap anak yatim, pembangunan atau renovasi mesjid, kegiatan kepemudaan, kegiatan sosil lain, dan sponsor acara kesehatan olahraga dll.
- e. Lingkungan terdiri dari: kampanye go green, konservasi lingkungan, perlindungan terhadap flora dan fauna, populsi, perbaikan dan pembuatan sarana umum, audit lingkungan, dan kebijakan manajemen lingkungan.

Metode penilaian (*scoring*) untuk setiap item tersebut adalah sebagai berikut:

- Nilai 0 untuk setiap item yang tidak diungkapkan
- Nilai 1 untuk setiap item yang diungkapkan

2. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas yaitu suatu variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat. variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris yang dimaksud adalah jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan yang diukur dengan cara menghitung jumlah anggota dewan komisaris perusahaan yang disebutkan dalam laporan tahunan perusahaan. Agar uraian jelas UDK untuk bank syariah yang menjadi sampel adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Ukuran Dewan Komisaris

Tahun	Ukuran Dewan Komisaris		
	BRI Syariah	BSM	Muamalat
2013	5	5	6
2014	5	5	6
2015	5	5	6
2016	5	5	4
2017	4	4	5

Sumber statistik bank syariah (2013-2017)

Berdasarkan tabel 3.1 diatas dapat di jelaskan bahwa bank BRI syariah pada tahun 2013-2016 ukuran dewan komisaris berjumlah 5 orang sedangkan 2017 dikurangi sehingga UDK berjumlah 4 orang. Bank BSM pada tahun 2013-2016 ukuran dewan komisaris berjumlah 5 orang sedangkan 2017 dikurangi sehingga UDK berjumlah 4 orang. Sedangkan pada bank Muamalat pada tahun 2013-2015 ukuran dewan komisaris berjumlah 6 orang sedangkan 2016 dikurangi sehingga UDK berjumlah 4 orang dan tahun 2015 ukuran dewan komisaris berjumlah 5 orang.

b. Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah merupakan jumlah anggota DPS dalam suatu perusahaan yang diukur dengan menghitung jumlah anggota DPS perusahaan yang tercantum pada laporan tahunan perusahaan. Agar uraian jelas DPS untuk bank syariah yang menjadi sampel adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Jumlah Dewan Pengawas Syariah

Tahun	Dewan Pengawas Syariah		
	BRI Syariah	BSM	Muamalat
2013	2	3	3
2014	2	3	3
2015	2	3	3
2016	2	3	3
2017	2	3	3

Sumber statistik bank syariah (2013-2017)

Berdasarkan pada tabel 3.2 diatas bahwa BRI syariah pada tahun 2013-2017 jumlah dewan pengawas syariah berjumlah 2 orang. Sedangkan bank BSM dan Muamalat jumlah dewan pengawas syariah berjumlah 3 orang dengan banyaknya jumlah dewan pengawas syariah pada perbankan syariah dapat mengawasi perbankan syariah agar oprasional bank dapat terlaksana deang baik sehingga mampu memberikan informasi kepada perbankan syraiah bahwa bank tempat mereka berinfestasi terjaga kehalalhnya berdasarkan pengawasan jumlah dewan pengaws syariah di Indonesia.

D. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah di Indonesia yang berjumlah 12. Sampel dalam penelitian ini adalah 3 unit bank umum syariah, yaitu bank muamalat, bank syariah mandiri, dan bank BRI syariah. Pada tahun 2012 bank yang memiliki sekor tertinggi dimiliki oleh dua bank umum yaitu bank syariah mandiri dan bank muamalat dengan skor yang sama yaitu 40. Kemudian disusul oleh bank BRI syariah dengan skor 37 (Rama, 2014:92). Penentuan

sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu data yang hanya memenuhi kriteria yang akan dijadikan sample. Kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.3

Kriteria Perbankan Syariah Di Indonesia

No	Kriteria Perbankan Syariah
1.	Bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2.	Bank syariah yang menyajikan <i>annual report</i> (laporan tahunan) periode 2013-2017 yang dapat diakses dari <i>website</i> masing-masing bank berdasarkan sampel penelitian.
3.	Memiliki data yang lengkap terkait dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian diperoleh dari berbagai informasi sebanyak-banyaknya untuk dijadikan sebagai dasar teori dan acuan dalam mengolah data. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data dari situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan dari website yang berkaitan dengan variabel yang telah dipilih. Data ini diperoleh dari *annual report* masing-masing Bank Syariah di Indonesia periode 2013-2017. Pemilihan sampel berdasarkan kriteria menghasilkan sampel sebanyak 3 unit bank umum syariah.

F. Teknik Analisis

1. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas data dilakukan dengan tujuan mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal akan mendekati normal atau tidak. Tingkat kenormalan data sangat penting, karena data yang

berdistribusi normal dianggap dapat mewakili populasi dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan indikator Kolmogorov-Smirnov dan P-Plot, dengan kriteria pengambilan keputusan dalam uji normalitas yaitu:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dan garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model asumsi normalitas tidak memenuhi uji asumsi normalitas.

2. Uji Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel independen dan dependen.

Persamaan regresi liner digambarkan dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Pengungkapan ISR perbankan syariah di Indonesia

a = Kostanta

X_1 = Ukuran dewan komisaris

X_2 = Ukuran dewan pengawasan syariah

e = Eror (Tingkat Kesalahan)

b_1, b_2 = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen

3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis yang dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu koefisien determinasi (R^2), uji signifikan simultan (F), dan uji statistik t (Uji-t) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Koefisien determinasi (R^2)

Pengukuran koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui presentase pengaruh variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Dari sini akan diketahui seberapa besar variabel dependen akan mampu dijelaskan oleh variabel dependennya. Nilai koefisien determinan adalah 0 dan 1. Koefisien determinasi (R^2) nol variabel independent sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila nilai yang mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa variabel-variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

Kd = Koefisien determinasi

r^2 = Koefisien korelasi

100% = Perkalian yang menyatakan presentase

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

- a. Jika Kd mendekati nol (0), maka pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent lemah.
- b. Jika Kd mendekati satu (1), maka pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent kuat.

b. Uji signifikansi simultan (F Test)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen (bebas) mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Apabila pengungkapan *islamic social reporting* lebih kecil

dari 0,05 (<5%) maka dikatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

$$\mathbf{F} = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan:

R^2 = koefisien korelasi berganda

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota data atau sampel

F = F-hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan F tabel.

Adapun prosedur pengujiannya adalah setelah melakukan perhitungan terhadap F-hitung kemudian membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel. Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut, apabila F-hitung > F-tabel dan tingkat signifikan (α) < 0,05 maka H_0 ditolak (H_a diterima), yang berarti secara simultan semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, begitupun sebaliknya. Sedangkan apabila F-hitung < F-tabel dan tingkat signifikan (α) > 0,05 maka H_0 diterima (H_a ditolak), yang berarti simultan semua variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

c. Uji Statistik t (Uji-t)

Uji t adalah pengujian secara statistik untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Ukuran dewan komisaris dan dewan pengawas syariah lebih kecil dari 0,05 (<5%) maka dapat dikatakan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji t dirumuskan sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

t = Distribusi t

r = Koefisien korelasi parsial

r^2 = Koefisien determinasi

n = Jumlah data atau sampel

Adapun variabel pengujiannya adalah setelah melakukan perhitungan terhadap t-hitung , kemudian membandingkan nilai t-hitung dengan nilai t-tabel. hasil perhitungan ini selanjutnya dibandingkan dengan t-tabel dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05. Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut;

- H_0 diterima jika nilai t-hitung \leq t-tabel atau nilai sig $> 0,05$
- H_0 ditolak jika nilai t-hitung \geq t-tabel atau nilai sig $< 0,05$

Apabila t-hitung $>$ t-tabel dan tingkat signifikansi (α) $< 0,05$ maka H_0 ditolak (H_a di terima), yang berarti secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan apabila t-hitung $<$ t-tabel dan tingkat signifikansi (α) $> 0,05$ maka H_0 diterima (H_a ditolak), yang berarti secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan penelitian asosiatif dan kuantitatif. Pada penelitian ini menggunakan persamaan analisis regresi berganda. Sebelum dilakukan pengujian mengenai pengaruh dan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, terlebih dahulu dilakukan analisis data dimulai dengan mengolah data dengan menggunakan microsoft excel, kemudian dilakukan pengujian uji asumsi klasik untuk mengetahui normalitas data, pengujian analisis regresi linier berganda, pengujian hipotesis antara lain; uji koefisien determinasi, uji signifikan simultan dan uji parsial.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan tahunan bank yang terdaftar dibursa efek indonesia (BEI) selama periode 2013-2017. Data sekunder diperoleh dari ketiga bank yaitu bank BRI syariah, BSM, dan Muamalat yang laporan keuangannya rutin diterbitkan oleh bank Indonesia yang dapat diakses di *website*.

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Uji normalitas menggunakan pendekatan Kolmogorov-Smirnov, dan pendekatan Normal P-Plot.

1) Pendekatan Kolmogorov-Smirnov

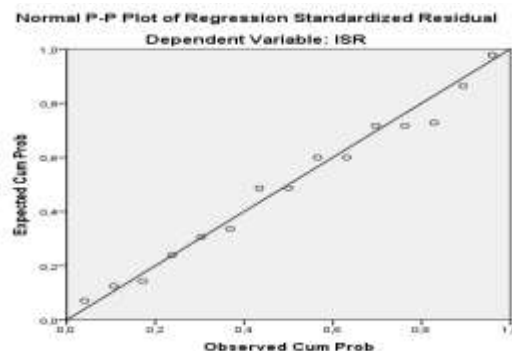
Tabel 4.1

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Predicted Value
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	19,0000000
	Std. Deviation	3,15394490
Most Extreme Differences	Absolute	,304
	Positive	,187
	Negative	-,304
Kolmogorov-Smirnov Z		1,176
Asymp. Sig. (2-tailed)		,126
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber; Hasil olahan data, 2018

Hasil dari uji kolmogrov-smirnov test di atas menunjukkan bahwa setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki data yang berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian memiliki nilai dari Kolmogorov-Smirnov Z besar 1,176 dengan signifikansi dari 0,126 > 0,05. Hal ini menunjukkan variabel residual berdistribusi normal.

2) Pendekatan Normal P-Plot Regression



Gambar 4.1 Pengujian *Normality P- Plot*
Sumber; Hasil Olah SPSS,2018.

Gambar diatas menunjukkan bahwa data (titik –titik) menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal tersebut. Hal ini membuktikan bahwa uji asumsi normalitas telah terpenuhi dalam model regresi.

2. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Terdapat hubungan antara dewan komisaris, dewan pengawas syariah terhadap *islamic social reporting* yang di tunjukkan pada tabel 4.3 berikut

Tabel 4.2
Hasil Analisis Regresi Berganda
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,842	7,177		,953	,359
UDK	-1,105	1,306	-,169	-,846	,414
DPS	6,632	1,753	,757	3,784	,003

a. Dependent Variable: ISR
Sumber; Hasil olahan data SPSS, 2018

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.3 dapat diketahui nilai koefisien regresi ukuran dewan komisaris (X_1) sebesar -1,105 dan dewan pengawas syariah (X_2) sebesar 6,632, terhadap *Islamic social reporting* (Y) dengan nilai konstanta sebesar 6,842. Dengan demikian terbentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2 X_2 + e$$

$$ISR = 6,842 + -1,105 UDK + 6,632 DPS + e$$

1. Nilai konstanta (a) adalah sebesar 6,842 menunjukkan apabila ukuran dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah dianggap konstan, maka *Islamic Social Reporting* bernilai 6,842 sebagai variabel terikat tidak dipengaruhi oleh perubahan pada ukuran dewan komisaris dan dewan pengawas syariah sebagai variabel bebas.
2. Variabel ukuran dewan komisaris sebesar -1,105 menyatakan bahwa apabila ukuran dewan komisaris meningkat 1 % maka *Islamic Social Reporting* meningkat sebesar -110,5%. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *Islamic social reporting* tetapi berhubungan negatif sebesar -1,105.
3. Variabel dewan pengawas syariah sebesar 6,632 menyatakan apabila dewan pengawas syariah meningkat 1 % maka *Islamic Social Reporting* akan meningkat 663,2% dan berhubungan secara positif sebesar 6,632. Sehingga dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap *islamic social reporting*.

Dari hasil analisis regresi berganda memberikan gambaran bahwa variabel independen yaitu ukuran dewan komisaris memiliki hubungan yang negatif terhadap variabel dependen ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak mempengaruhi pengungkapan *islamic social reporting* sedangkan dewan pengawas syariah memiliki hubungan yang positif terhadap variabel dependen

yaitu tingkat pengaruh yang ditunjukkan dengan nilai koefisien dewan pengawas syariah yang berhubungan positif terhadap pengungkapan ISR perbankan syariah di Indonesia.

3. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Apabila nilai R^2 mendekati 1, dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas secara keseluruhan berpengaruh besar terhadap variabel terikat. Dari hasil analisis data diperoleh hasil koefisien determinasi yang ditunjukkan pada tabel 4.4:

Tabel 4.3
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,738 ^a	,544	,468	3,11899

a. Predictors: (Constant), DPS, UDK

Sumber; Hasil olahan data SPSS, 2018

Berdasarkan uji koefisien determinasi pada tabel 4.4 menunjukkan koefisien korelasi R dan koefisien determinasi (R square). Nilai R menunjukkan hubungan antar variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Dari hasil olah data nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,738 atau 73,8 % artinya terdapat hubungan antara variabel ukuran dewan komisaris (UDK) dan dewan pengawas syariah (DPS) terhadap *Islamic Social Reporting* yang mendekati nilai 1 yaitu nilainya adalah 73,8% sehingga dapat dikategorikan cukup kuat.

Nilai *R square* sebesar 0.544 berarti sebesar 54,4% yang berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* dapat dijelaskan oleh variabel UDK dan DPS. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 45,6% (100% - 54,4%) dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar penelitian ini.

b. Uji F (Uji Simultan)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Uji – F dicari dengan melihat F-hitung dari tabel anova.

Tabel 4.4

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	139,263	2	69,632	7,158	,009 ^b
	Residual	116,737	12	9,728		
	Total	256,000	14			

a. Dependent Variable: ISR

b. Predictors: (Constant), DPS, UDK

Berdasarkan hasil regresi dapat diketahui bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai F-hitung sebesar 7,158 > F-tabel sebesar 3,89 dengan signifikansi sebesar 0,009 < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa secara simultan, variabel ukuran dewan komisaris dan dewan pengawas syariah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *Islamic Social Reporting*.

c. Uji t (Uji Parsial)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah setiap variabel bebas, yaitu ukuran dewan komisaris dan dewan pengawas syariah secara parsial

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat, yaitu *Islamic Social Reporting* Pengujian dilakukan dengan menggunakan derajat signifikansi sebesar 5% atau 0,05 dengan:

- a) Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ dan nilai signifikansi $t < 0,05$, maka secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b) Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ dan nilai signifikansi $t > 0,05$, maka secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.5
Hasil Uji t Signifikan Parsial
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,842	7,177		,953	,359
UDK	-1,105	1,306	-,169	-,846	,414
DPS	6,632	1,753	,757	3,784	,003

a. Dependent Variable: ISR
Sumber; Hasil olahan data SPSS, 2018

Harga $t\text{-hitung}$ yang ada selanjutnya dibandingkan dengan $t\text{-tabel}$. Untuk kesalahan 5 % uji dua pihak dan $df = n - k = 15 - 2 = 13$, maka diperoleh $t\text{-tabel} = 2,160$ ($t\text{-tabel}$ terlampir).

Keterangan: $df = \text{degree of freedom}$

n = jumlah observasi

k = jumlah variabel

Berdasarkan tabel 4.6 maka hasil regresi berganda dapat menganalisis pengaruh dari masing-masing variabel ukuran dewan komisaris dan dewan pengawas syariah dan dapat dilihat dari arah tanda dan tingkat signifikan *Islamic Social Reporting* sebagai berikut :

1. Nilai t-hitung variabel ukuran dewan komisaris $-0,846 < t\text{-tabel } 2,160$ dan nilai signifikan sebesar $0,414 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *Islamic Social Reporting*, tetapi mempunyai hubungan negatif terhadap ISR.
2. Nilai t-hitung variabel dewan pengawas syariah $3,784 > t\text{-tabel } 2,160$ dan nilai signifikan sebesar $0,003 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel dewan pengawas syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Islamic Social Reporting*.

B. Pembahasan

Berdasarkan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis maka dapat disimpulkan :

1. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap Pengungkapan *Islamic Social* pada Perbankan Syariah *Reporting*

Dalam penelitian ini, uji t menunjukkan variabel ukuran dewan komisaris memiliki nilai signifikansi sebesar 0,414 atau signifikansi dibawah $\alpha = 0,05$ dan nilai t-hitung $-0,846 < t\text{-tabel } 2,160$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *Islamic Social Reporting* tetapi mempunyai hubungan negatif terhadap ISR.

Ukuran dewan komisaris adalah mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Semakin besar ukuran dewan komisaris dalam suatu perusahaan, maka pengawasan akan semakin baik. Dengan pengawasan yang baik, maka diharapkan pengungkapan ISR akan semakin luas karena dapat meminimalisir informasi yang mungkin dapat disembunyikan oleh manajemen.

Pada penelitian ini ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh karena ukuran dewan komisaris tidak melakukan tanggung jawab yang baik dalam mengawasi perusahaan, sehingga dewan komisaris memungkinkan dapat disembunyikan oleh manajemen.

Hasil penelitian ini yang dilakukan Annisa Difa Saufanny Dan Siti Khomsatun (2017) yang menyatakan Dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap *Islamic Standar Reporting (ISR)*. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Amirul Khoiruddin (2013) dengan menggunakan sampel 12 bank syariah yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting* perbankan syariah di Indonesia.

2. Pengaruh dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Berdasarkan hasil analisis nilai t-hitung variabel dewan pengawas syariah $3,784 > t\text{-tabel } 2,160$ dan nilai signifikan sebesar $0,003 < 0,05$. Variabel ukuran dewan pengawas syariah memiliki nilai signifikansi $0,006$ atau berada di-bawah taraf signifikan $0,05$. Hasil tersebut menunjukkan variabel dewan pengawas syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Islamic Social Reporting* pada bank umum syariah di Indonesia, yang berarti bahwa semakin banyaknya jumlah dewan pengawas syariah yang berfungsi sebagai pengawas di dalam suatu institusi syariah, dalam hal ini perbankan syariah, maka semakin luas pula peng-ungkapan ISR pada perbankan syariah tersebut. Berpengaruhnya ukuran dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan ISR dikarenakan, semakin baiknya peran dewan pengawas syariah dalam mengawasi segala aktifitas perbankan yang harus dijalankan

didasarkan dengan prinsip-prinsip syariah, maka semakin baik pula kinerja dan *output* yang dihasilkan oleh perbankan syariah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Khoirudin (2013) yang menyatakan adanya pengaruh dewan pengawas syariah tidak signifikan terhadap pengungkapan ISR perbankan syariah di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan karena adanya perbedaan sampel penelitian, dimana peneliti menggunakan sampel lebih sedikit yaitu hanya 3 perbankan syariah sementara penelitian Khoruddin (2013) menggunakan 11 sampel perbankan syariah, perbedaan tahun penelitian, dimana penelitian ini menggunakan 5 tahun yaitu 2013-2017, sedangkan penelitian sebelumnya hanya meneliti selama 2010-2011. Sehingga tahun penelitian atau faktor lain tidak dapat diidentifikasi, sehingga hasilnya tidak sama.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Ukuran dewan komisaris secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah di Indonesia, tetapi memiliki hubungan negatif. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t dengan nilai t hitung sebesar -0,846 dan nilai signifikansi sebesar 0,414 lebih besar dari 0,05.
2. Dewan pengawas syariah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel *Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah di Indonesia . Hal ini dibuktikan dengan hasil uji signifikansi parameter individual (uji-t) dengan nilai t hitung sebesar 3,784 dan nilai signifikansi sebesar 0,003.
3. Secara simultan, ukuran dewan komisaris dan dewan pengawas syariah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah yang menjadi sampel di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut :

1. Sampel pada penelitian ini adalah 3 unit selama 5 tahun yaitu periode 2013-2017, sebaiknya peneliti selanjutnya perlu menambahkan jumlah sampel dan jangka waktu yang lebih panjang.

2. Peneliti berikut juga perlu menambahkan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian seperti, ukuran perusahaan, profitabilitas yang mungkin hasilnya akan mendukung penelitian ini.
3. Sebaiknya bank syariah menyediakan laporan mengenai *islamic social reporting* yang transparansi dan detail.



DAFTAR PUSTAKA

- Afidah, N., Wahid, A., dan Junaidi. 2015. Analisis Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perbankan Syariah Di Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Indeks. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, ISSN: 2302-7061, Vol.04, No.03.
- Darsono, Sakti, A., dan Ascara. 2017. *Perbankan Syariah Di Indonesi: Kelembagaan Dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Inuzula, Lakharis. 2017. Pengaruh Size, Profitabilitas, Dan Dewan Pengawasan Syariah Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah Di Indonesi. *Jurnal Kebangsaan*, Vol.6, No.11.
- Junaidi. 2015. Analisis Pengungkapan CSR Perbankan Syariah Di Indonesia Berdasarkan Indeks Islamic Social Reporting: Studi pada 4 Bank Umum Syariah Tahun 2013. *Jurnal Akuntansi*, Vol.2, No.1, Hal. 16-21.
- Khoirudin, Amirul. 2013. Corporate Governance Dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal 2*.
- Karim, A. A., dan Ahmad, K. B. 2017. *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, Prenada Media Grop.
- Merina, C. I., dan Verawaty. 2016 . Analisis Komparasi *Indeks Islamic Social Reporting* Perusahaan Perbankan Syariah Dan Perusahaan *Go Publik* Yang *Listing* Di Jakarta *Islamic Indeks*. Akuisisi-Vol 12. No.2 November 2016.
- Nugraheni, P., dan Yuliani, R. D. 2017. Mekanisme Corporate Governance Dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol.10, No.1, 2017.
- Putri, T. K. 2014. *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting Perusahaan- Perusahaan Yang Terdaftar Pada Indeks Saham Syariah Di Indonesia(ISSI) Tahun 2011-2012*. Universitas Diponegoro Semarang: Skripsi.
- Purnama, M. I. 2016. *Pengaruh Islamic Social Reporting Terhadap Nilai Perusahaan Bank Syariah Di Indonesia*. Paskasarjana Institut Agama Islam Negri (IAIN) Surakarta: Tesis.
- Rama, Ali. 2014. Analisis Determinan Pengungkapan islamic Social Reporting: Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia . vol.2, No.1.

- Rompas, R., Ilat, V., dan Poputra, A.T. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Governance Pada Laporan Tahunan Perusahaan Yang Terdaftar Dalam LQ-45 Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Emba*, Vol.2, No.3, Hal. 841-851.
- Rizal, Y., Martawireja, A. E., dan Abdurahim, A. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontenporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2014. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R &D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sunarto, C. N., 2016. Syariah Governance Dalam Pengungkapan Islamic Social Reporting Indeks Dan Global Reporting Indeks Pada Perbankan Syariah Priode 2010-2013. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol.2, No.1, Januari-Juni 2016.
- Saufanny, A. D., dan Khomsatun, S. 2017. Corporate Governance Dan Pengungkapan Manajemen Risiko Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, Vol.5, No.1, April 2017, Hal. 47-61.
- Umam, K., dan Utomo, S. B. 2017. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.



L

A

M

P

I

R

A

N

1. Data Pengungkapan indeks ISR

ITEM YANG DIUNGKAPKAN	BRI SYARIAH					BSM					MUAMALAT				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
Investasi Keuangan															
1. Aktivitas riba	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Gharar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
3. Zakat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4. kebijakan dalam mengatasi keterlambatan pembayaran oleh insolvent clients	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
5. current value balance sheet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. value added statements	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Produk Dan Jasa															
1. status halal atau syariah dalam produk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. pengembangan produk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3. peningkatan pelayanan	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4. keluhan pelanggan	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Karyawan															
1. karakteristik pekerjaan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. pendidikan dan pelatihan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3. kesempatan yang sama	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1

4. kesehatan dan keselamatan kerja	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5. lingkungan kerja	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1
6. perekrutan khusus	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
Masyarakat/Sosial															
1. shadaqoh/donasi	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
2. wakaf	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1
3. qard hasan	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4. zakat atau sumbangan dari karyawan atau nasabah	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5. pendidikan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6. bantuan kesehatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
7. pemberdayaan ekonomi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8. kepedulian terhadap anak yatim	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9. pembangunan atau renovasi mesjid	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
10. kegiatan kepemudaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. kegiatan sosial lain	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12. sponsor acara kesehatan, olahraga, edukasi, dan lain-lain	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Lingkungan															
1. kampanye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

go green															
2. konservasi lingkungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. perlindungan terhadap flora dan fauna	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. polusi	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
5. perbaikan dan pembuatan sarana umum	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
6. audit lingkungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. kebijakan manajemen lingkungan	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	10	11	13	18	22	19	23	23	22	19	22	20	20	21	22

2. Jumlah Ukuran Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

	BRI SYARIAH					BSM					MUAMALAT				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
UDK	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	6	6	6	4	5
DPS	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

3. Hasil Uji Normalitas

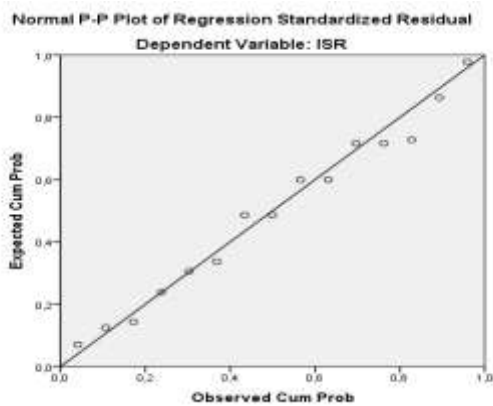
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Predicted Value
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	19,0000000
	Std. Deviation	3,15394490
Most Extreme	Absolute	,304

Differences	Positive	,187
	Negative	-,304
Kolmogorov-Smirnov Z		1,176
Asymp. Sig. (2-tailed)		,126

- a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

P-Plot



4. Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,842	7,177		,953	,359
UDK	-1,105	1,306	-,169	-,846	,414
DPS	6,632	1,753	,757	3,784	,003

a. Dependent Variable: ISR
Sumber; Hasil olahan data SPSS, 2018

5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,738 ^a	,544	,468	3,11899

a. Predictors: (Constant), DPS, UDK

Sumber; Hasil olahan data SPSS, 2018

6. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	139,263	2	69,632	7,158	,009 ^b
	Residual	116,737	12	9,728		
	Total	256,000	14			

a. Dependent Variable: ISR

b. Predictors: (Constant), DPS, UDK

7. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,842	7,177		,953	,359
UDK	-1,105	1,306	-,169	-,846	,414
DPS	6,632	1,753	,757	3,784	,003

a. Dependent Variable: ISR

Sumber; Hasil olahan data SPSS, 2018

BIOGRAFI PENULIS



Ramlah panggilan Lala lahir di Bulucenrana pada tanggal 28 february 1995 dari pasangan suami istri dari bapak Zakaria dan ibu Lija. Peneliti bertempat tinggal di Bumi Permata Hijau, Bumi 2 Blok B1 No.14, Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri 4 Otting lulus tahun 2008, SMP Negeri 4 Pitu Riawa lulus tahun 2011, SMA Wahyu Makassar, dan mulai tahun 2014 mengikuti program S1 Akuntansi kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulis skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

